

KEPEMIMPINAN DAN KORUPSI (SIMBIOSIS MUTUALISME)

M. Fajar Hidayanto*

Abstract

The leadership and corruption in this era denote two sides of a coin and closed related to each other. The corruption happens in Indonesia because of untrusted leadership. The standard that can be an indicator of successful leadership is not enough only to free and does not punish corruptors. The long term and ideal leadership is clean and free from corruption.

Kata kunci: pemimpin, korupsi, curang, dan negara

I. Pendahuluan

Keterkaitan antara kepemimpinan dan korupsi secara umum sulit rasanya untuk dipertemukan, karena dari keduanya tidak menunjukkan dalam satu masalah yang dapat dipersamakan. Namun apabila dicoba dihubungkan dengan pengertian bahwa kepemimpinan dapat saja melahirkan, atau membiarkan terjadinya tindakan-tindakan korupsi. Kiranya relevan dari kedua istilah ini di posisikan sebagai dua persoalan yang dapat saling mendukung dan bahkan saling memenuhi.

Kepemimpinan yang baik dan berhasil sudah barang tentu akan disebut sebagai penyebab terjadinya akibat-akibat baik dalam berbagai hasil sesuai lingkup kepemimpinan. Namun sebaliknya kepemimpinan yang buruk dan gagal akan disebut sebagai penyebab terjadinya akibat-akibat buruk (jahat) dalam berbagai hal pula. Korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan atau

*Drs. M. Fajar Hidayanto, MM adalah dosen tetap Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

perbuatan curang (Khasan. Tt. 133), oleh agama atau bangsa manapun tidak dibenarkan dan oleh peraturan hukum di Indonesia jelas diatur sejak tahun 1971 dalam Undang-Undang No. 3 (LN 1971/19.T.L.N.No 2958) tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mungkinkah meluas dan merajalelanya korupsi bahkan sebagian kalangan menyebut sebagian telah menjadi budaya ditengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia ini merupakan simbiosis mutualisme dengan kepemimpinan yang ada. Pembahasan selanjutnya akan menguraikan masalah tersebut.

II. Teori-teori Kepemimpinan

Sejumlah teori kepemimpinan yang terdapat pada berbagai literatur, tidak satu pun menunjukkan keterkaitan dengan masalah korupsi, namun jika hubungannya dengan keberhasilan atau kegagalan, kesejahteraan atau kesengsaraan pada masyarakat yang dipimpin, maka hampir semua teori mengarah pada hal tersebut, sehingga menempatkan terdapatnya tindakan korupsi dalam suatu komunitas kepemimpinan adalah bagian dari kegagalan pemimpin karena hakikatnya korupsi dapat merugikan kepentingan orang banyak, walaupun pelaku korupsi / koruptor akan dapat hidup enak dari hasil korupsinya, apalagi jika pemimpinnya membiarkan atau tidak membuat jera melalui penegakan hukum dan tidak dapat membersihkan lingkungannya dari “kotoran sosial “yang satu ini.

Teori Enviromental menyatakan bahwa kepemimpinan itu terjadi karena faktor lingkungan sosial yang merupakan tatanan untuk dapat diatasi atau diselesaikan (Zainudin, 2002, 4) sehingga kemampuan dan ketrampilan memimpin adalah syarat utama untuk dapat memecahkan masalah sosial dalam keadaan tertekan atau perubahan dan adaptasi.

Dari teori Enviromental ini relevan untuk ditempatkan sebuah persoalan sosial yang sangat populer ditengah masyarakat, di satu sisi dianggap kejahatan, perbuatan sangat tercela, dan tidak pantas disandang oleh umat beragama, namun di sisi lain telah melekat erat bak budaya bahkan telah menjadi “prestasi buruk” dan spektakuler ditengah bangsa-bangsa lain di dunia ini. Sehingga sudah pasti sangat menekan bagi kepemimpinan nasional untuk mampu menyelesaikan masalah sosial yang akut ini. Dari teori ini dapat ditegaskan bahwa keberhasilan dalam memberantas korupsi adalah termasuk nilai penentu bagi kesuksesan kepemimpinan secara keseluruhan.

Teori Humanistik, teori ini menekankan adanya suatu kelompok masyarakat atau organisasi, jika ada kelompok atau organisasi, maka akan muncul pemimpin dan fungsi kepemimpinan adalah mengatur kebebasan individu untuk dapat merealisasikan motivasi dari rakyat agar dapat bersama-sama mencapai tujuan. Organisasi juga berfungsi sebagai wadah yang dapat menampung tuntutan kemanusiaan berupa kebutuhan politik, ekonomi, sosial dan budaya untuk mengontrol sebuah kegiatan besar yaitu bernegara agar benar-benar menjadi terarah dan memiliki tanggung jawab.

Adalah pemenuhan kebutuhan yang manusiawi apabila kelompok atau organisasi dalam bentuk apapun yang ada di negeri ini tidak menjadi wadah yang terkotori oleh tindakan-tindakan individu berupa penyelewengan atau kecurangan dalam kategori korupsi. Dan peran kepemimpinanlah yang dapat mengarahkan masing-masing individu ataupun masyarakat dengan badan / lembaganya yang mungkin menjadi sumber korupsi (Hediarti, 1994, 82) untuk tidak terjangkit penyakit sosial dan sudah sangat membahayakan keselamatan negeri ini.

Teori kekuasaan, kewibawaan dan kemampuan, sebuah teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa ketiganya harus menyatu saling memenuhi dan melengkapi (Kartini Kartono dalam K.Permadi, 1996, 15).

Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberi wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan mengarahkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Kewibawaan adalah kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh kepada pemimpin dan berusaha melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Kemampuan yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecukupan serta ketrampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.

Dari teori ini kepemimpinan yang telah memiliki kekuasaan yaitu berupa kekuatan, legalitas dan kewenangan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang-orang yang dipimpin agar tidak membiarkan dan atau melakukan korupsi, akan diabaikan oleh staf atau anak buahnya jika tidak memiliki kewibawaan dan kewibawaan seorang pemimpin menjadi faktor kelebihan, keunggulan dan keutamaannya dalam memimpin, namun dengan kebiasaan dan kewibawaannya juga belum tentu orang-orang dibawah kepemimpinannya akan patuh atau bersih dari korupsi, kecuali sang pemimpin melengkapi dirinya dengan kemampuan, yaitu mampu dengan segala daya dan upaya, kesanggupan, kecakapan serta ketrampilannya dalam memberantas korupsi. Termasuk kecakapan dan ketrampilannya

adalah keberhasilan melakukan perubahan dari budaya korupsi menjadi budaya bersih diri, demikian juga keberhasilannya dalam penegakan hukum yang adil (bukan saja supremasi). Penegakan supremasi hukum belum tentu adil dan penegakan keadilan sudah pasti termasuk supremasi hukum didalamnya.

III. Permasalahan Korupsi

Korupsi adalah sebuah cela atau aib yang sangat akrab ditelinga orang Indonesia. Hampir setiap hari media massa baik cetak maupun elektronik mengungkapkan permasalahan yang satu ini dalam berbagai ragam dan tingkatannya. Kendatipun semua orang tidak dapat menerima praktik-praktik korupsi, tetapi korupsi hampir melibatkan semua orang (Mufid, 1997, 13). Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat, pengusaha dan pegawai negeri / swasta, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dengan lembaga-lembaga sosial dan bahkan lembaga keagamaan. Dimanapun, manakala ada kesempatan, orang akan melakukan korupsi.

Dimulai dari rumah tangga, seorang anak, suami atau istri, ada yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab terhadap amanat yang diterimanya. Ketika seorang anak diminta belanja dan uangnya lebih, kemudian tidak dikembalikan, maka hal itu merupakan awal dari sebuah praktik korupsi, jika sebagai orang tua, kerap mengabaikan bahkan membiarkan hal-hal kecil berupa kewenangan yang terjadi dalam rumah tangga, maka sama dengan memberikan pendidikan korupsi dalam keluarganya sendiri.

Praktek tidak jujur dapat pula terjadi berupa hubungan sosial pada tingkat kelompok masyarakat / organisasi yang paling kecil / bawah, RT, RW, Dusun dan Desa. Kutipan dan tarikan iuran dari warga ada pula yang tidak dipertanggung jawabkan, demikian pula kepanitiaan yang dibentuk oleh warga dan dari warga sendiri tidak jarang yang berbuat curang, bahkan tidak sedikit merambah pada panitia pembangunan rumah ibadah yang sakral, belum lagi masih sering dijumpai di tengah jalan raya, di siang hari bolong polisi yang notabennya adalah penegak hukum justru dengan sewenang-wenang meminta denda langsung dengan alasan pelanggaran lalu lintas padahal uang denda dari masyarakat itu hanya masuk kantongnya sendiri, karena tidak jarang surat tilang hanya sebagai kedok dan proses peradilan lalu lintas tidak diberlakukan.

Uraian di atas barulah realitas kecil yang dapat diungkapkan tanpa harus dengan data-data hasil penelitian yang valid tentang korupsi.

Korupsi sebagai tingkah laku pejabat yang menyimpang dari norma yang telah di terima oleh masyarakat, dengan maksud memperkaya pribadi. Bentuk lain adalah balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat, dari ilustrasi ini, ciri yang sangat menonjol dalam masalah korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar asas pemisahan keuangan pribadi dengan keuangan politik (Noeh, 1996).

Korupsi juga terjadi pada tindakan di luar hukum untuk mempengaruhi tindakan dan kebijakan birokrasi, dalam hal ini korupsi ditujukan untuk “membeli” persetujuan pejabat yang bertanggung jawab dalam penetapan dan melaksanakan kebijakan tertentu. Misalnya menyogok pejabat untuk mendapat surat izin atau untuk mendapat kemudahan-kemudahan tertentu, menghindari pajak / denda dan lain-lain, didalamnya terjadi praktek suap yang memasukkan uang ke kantong milik pribadi pejabat bukan ke kas negara. Karena itulah korupsi sangat bertentangan dengan hukum dan keadilan.

IV. Kepemimpinan dan Tokoh Korupsi

Sepanjang sejarah, manusia tidak henti-hentinya mengecam dan mencoba memberantas korupsi. Namun ironis, manusia pun tidak pernah “lelah” mempraktekannya. Bisa jadi korupsi telah menjadi watak alam. Karena hampir mustahil, menghapus korupsi sama sekali. Dalam hal ini seorang Menteri di era kepemimpinan orde baru, yakni TB. Silalahi pernah berujar : “Korupsi hanya bisa dihapus di surga” (Republika, 9 Juli 1997).

Di negara maju sekaliber Amerika Serikat, korupsi tetap menjadi persoalan besar. Undang-Undang Amerika mengharuskan pejabat mengungkapkan daftar kekayaan, baik sebelum maupun sesudah memegang jabatan, hal ini tidak bisa lepas dari upaya memberantas korupsi. Dan saat ini telah sampai peraturan semacam itu berlaku di Indonesia. Walaupun masih sebatas kewenangan dan tugas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) penegakannya belum menjadi sikap dan kebiasaan baik bagi setiap pejabat untuk tampil sebagai “*The Cleans Man*” karena bagi sebagian besar pejabat di Indonesia masih terkesan terpaksa dan formalitas.

Tokoh korupsi yang sangat dikenal pada suatu pemerintahan dapat ditunjukkan melalui kepemimpinan Mobutu atas Zaire. Hingga matinya Mobutu tetap dikecam dengan banyak sindiran dan doa melaknat, seperti dinyatakan “Afrika harus belajar dengan biaya yang sangat mahal, bahwa orang besar (*The Big Man*) akan berubah dengan mudah menjadi pendusta

ulung dan musuh nomor satu masyarakat (Kompas 14 September 1997).

Daftar negara terkorup sepuluh besar di dunia termasuk didalamnya adalah Indonesia, atau diantara negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dalam soal korupsi, Indonesia paling mencolok (Tempo, 6 Februari 2005). Untuk melihat secara kritis maka faktor kepemimpinan Nasional sangatlah menentukan, sehingga sedemikian tinggi prestasi buruk dalam bidang korupsi disandang oleh bangsa Indonesia yang kehidupannya sangat religius bahkan mayoritas penduduknya adalah muslim. Islam sebagai agama syah dan ditaati oleh sebagian besar pemeluknya di Indonesia apa mungkin mengajarkan dan melegitimasi amalan-amalan korupsi, atau korupsi memang suatu simbiosis mutualisme dengan kepemimpinan nasional. Dari sejarah korupsi di Indonesia factor kepemimpinan sangat signifikan, sedang peran agama atau Tokoh-tokohnya berada di seberang jalan untuk senantiasa menyerukan perang melawan korupsi yang berarti juga melawan pemimpin-pemimpin yang membiarkan atau bahkan melakukan korupsi.

Setelah memasuki Era Reformasi hingga saat ini, empat pemimpin nasional (Presiden) silih berganti memimpin dengan tidak satu pun diantara mereka (Habibie, KH Abdulrahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono), mencapai puncak keberhasilannya dalam menaklukkan korupsi. Walaupun masing-masing dari mereka hingga saat ini tidak atau belum bisa disebut sebagai pemimpin yang korup. Namun seperti di ketahui secara umum bahwa Indonesia masih menyandang sebagai negeri Terkorup.

Signifikansi lain dari peran kepemimpinan nasional terhadap tumbuh suburnya korupsi di Indonesia, jika dirunut dari awal kemerdekaan, tidak lepas dari tokoh utamanya, Presiden Sukarno yang memperkenalkan konsep “Ekonomi Terpimpin”, sehingga menjadi cikal bakal meluasnya secara besar-besaran dan ketika itu perusahaan-perusahaan swasta asing diambil alih oleh negara dan pejabat sipil serta pejabat militer dibiarkan mengurus proyek-proyek nasional yang sesungguhnya tidak profesional dan tidak lazim dengan tugas mereka (Tempo. 6 Februari 2005).

Korupsi mencapai puncak kekuasaan dan terpelihara dalam waktu yang cukup lama adalah di Era Kepemimpinan Orde Baru, tidak kurang dari separuh umur kemerdekaan terhitung hingga saat ini (30 tahun) rezim orde baru bercokol dengan kokoh dan dengan prestasi-prestasinya menjalankan pembangunan di negeri ini, sehingga tokoh pemimpin yang sangat dikenal dengan sebutan “Bapak Pembangunan”, bagi Presiden Suharto waktu itu, diakhir kepemimpinannya melekat sebagai tokoh KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), terlepas dari terbebasnya beliau dari segala bentuk jerat hukum

yang mestinya dapat membuktikan berbagai sisi buruk dari kepemimpinannya sebagai penyelenggara negara (UU No. 28 tahun 1999). Lemahnya peraturan hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka melawan penyakit korupsi yang sudah parah, maka dengan mudah akan menjadi penyelamat bagi pemimpin / tokoh yang korup untuk tidak terkena sanksi hukum. Namun fakta dan sejarah dikemudian hari pasti akan berbicara lain.

V. Pemimpin Bersih Bebas Korupsi

Menatap ke depan tentang kepemimpinan bersih bebas korupsi, mungkinkah dicapai oleh bangsa Indonesia. Dengan sikap pesimis dan skeptis menghadapi dan merasakan langsung keadaan yang terjadi hampir mustahil hal ini diwujudkan, karena dengan istilah korupsi telah membudaya, mendarah daging dan saling memenuhi dan membutuhkan pada berbagai bidang kehidupan, maka rasanya tinggal menunggu takdir Tuhan, apakah yang akan mengalahkan korupsi itu berupa adzab atau bencana sehingga digantilah oleh Tuhan generasi kehidupan saat ini dengan kehidupan baru pasca adzab atau bencana nanti menjadi generasi yang bersih dan bebas korupsi .

Sebagai insan normal dan beragama, sudah barang tentu skeptis dan pesimis itu harus dijauhkan dari sifat dan sikap kita, paling tidak dengan belajar dari sejarah kepemimpinan yang terus berjalan hingga saat ini, mengikuti jalan berfikir secara positif (positif thinking), maka dapat ditemukan suatu proses yang masih dan sedang berjalan mengenai kepemimpinan dan korupsi ini menuju keadaan yang lebih baik dan terbuka harapan untuk tidak selamanya dari keduanya menjadi simbiosis mutualisme, namun sebaliknya justru keduanya harus saling terpisah dan kontradiksi, karena hakekatnya kepemimpinan dalam bentuk dan level apapun tidak pernah dapat disebut berhasil jika korupsi masih terdapat didalamnya.

Berikut indentifikasi proses masih dan sedang berjalannya sejarah kepemimpinan nasional mengikuti evolusi perubahan zaman yang terus bergerak semenjak dari asal-usulnya dan munculnya budaya korupsi, tumbuh berkembangnya dan proses kesadaran serta tekad pemberantasannya oleh kepemimpinan terbaru yang kini tengah berkuasa, semoga arahnya menuju puncak prestasi kepemimpinan yang bersih bebas korupsi, walau entah sampai kapan dapat terealisasi dari cita-cita yang ideal ini.

Akar masalah terjadinya korupsi di Indonesia adalah terjadinya penjajahan yang berlangsung sangat lama, sebagai wujud kolonisasi oleh

bangsa lain (Belanda) dengan praktek-praktek penindasan, intimidasi, pembodohan dan kesengsaraan yang dialami oleh nenek moyang bangsa Indonesia dimasa lalu. Di era penjajahan inilah awal mula atau asal-usul mental korupsi yang dipraktekkan oleh pemimpin kolonial terhadap setiap anggota masyarakat dan seluruh aspek komunitasnya.

Setelah memasuki Era Kemerdekaan, ketika “Ekonomi Terpimpin” bertaut dengan “Demokrasi Terpimpin”, kekuasaan yang begitu besar dikalangan birokrasi yang oleh PKI kemudian disebut sebagai “Kapitalis Birokrat” akhirnya tak terkendali sehingga memunculkan praktek-praktek korupsi, terutama dipelopori oleh kalangan pejabat / pemimpin pemerintahan (Gunawan Muhammad, Tempo 6 Februari 2005).

Di Era Orde Baru, korupsi adalah Trade Mark kepemimpinan yang sangat populer hingga saat ini bersanding menjadi kosa kata sejajar dalam arti sama dengan penyelewengan atau kecurangan, yaitu dua kata yang lain selain kata korupsi : kolusi dan nepotisme untuk dikenal sebagai istilah KKN, sehingga tepat kiranya di era kepemimpinan orde baru ini adalah masa tumbuh subur dan berkembangnya korupsi secara besar-besaran

Pasca kepemimpinan orde baru era reformasi dimulai dengan penuh harapan bahwa KKN dijadikan thema central untuk dihabisi agar bangsa Indonesia mencapai cita-cita kemakmuran dan keadilan yang berarti korupsi, kolusi dan nepotisme adalah sumber penghalang untuk mencapai cita-cita itu. Setelah tiga kali pergantian kepemimpinan dengan masing-masing type dan gaya kepemimpinannya pasti menyuarakan anti KKN, namun pada kenyataannya korupsi tetap menjadi masalah utama lagi pelik di negeri ini, bahkan di era ini seiring dengan berlakunya perubahan dan model pemerintahan otonomi daerah, justru lebih menambah peluang terjadinya korupsi ditingkat daerah, setelah ditingkat pusat seharusnya surut oleh karena desentralisasi kekuasaan.

Tiga figur pemimpin yang telah lalu (Habibie, Gus Dur dan Mega) di masa reformasi untuk tidak sepenuhnya dianggap gagal dalam pemberantasan korupsi, di masa itu penting untuk diberi predikat “Kepemimpinan yang telah menyadari akan bahaya korupsi”. Namun belum banyak berbuat untuk melawannya dan hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai bentuk perUndang-Undangan seperti UU No. 28 Th. 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan UU No. 5 Th. 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Kara, 2005, 194), serta berbagai kebijakan-kebijakan yang bersifat clean governance dan lain-lain yang dimotori oleh pemerintah.

Dalam waktu belum lama ini kepemimpinan nasional Indonesia memasuki era demokrasi yang baru dengan telah berhasilnya bangsa Indonesia dalam memilih dan menentukan pemimpinnya (Presiden) dengan pemilihan umum secara langsung. Terdapat keterkaitan antara tekad dan janji yang menjadi misi dan visi kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yaitu dengan mengusung thema Perubahan dan salah satu isu sentral perubahannya adalah pemberantasan korupsi. Kepemimpinan yang baru berumur sekitar seratus hari ini tentunya baru melampaui dua tahap yang memang harus dilalui sepanjang kepemimpinannya nanti. Pertama tahap kampanye yang penuh dengan slogan dan janji-janji yang pernah dilontarkan untuk dapat mengalahkan korupsi, slogan dan janji praktis telah diterima oleh rakyat dengan bukti pilihan rakyat telah memenangkannya menjadi presiden. Tahap kedua adalah awal kepemimpinannya dengan langkah-langkah atau gebrakan politiknya didalam memberantas korupsi, menurut Muchtar Pabot Tinggi (dalam Tempo, 5 Februari 2005). Kepemimpinan SBY ini memiliki visi memberantas korupsi namun diragukan keberaniannya. Sehingga masih jauh untuk dapat disebut sebagai kepemimpinan yang betul-betul anti korupsi apalagi sebagai kepemimpinan yang bersih dan bebas dari korupsi.

VI. Penutup

Untuk tidak skeptis terhadap fakta kepemimpinan dan korupsi yang ada dan tidak membiarkan terjadinya simbiosis mutualisme dari keduanya, maka harapan ke depan dari kepemimpinan yang berhasil dan efektif, menjunjung tinggi keadilan dan supremasi hukum, sehingga benar-benar diliputi dengan kenyataan bahwa pemerintahan SBY anti korupsi dan bukan sebaliknya membiarkan dan bahkan mempraktekkan korupsi disana-sini. Adapun untuk mencapai prestasi kepemimpinan yang bersih bebas korupsi baru akan dibuktikan di akhir masa kepemimpinannya nanti, apakah akan dapat dilalui dalam waktu yang masih cukup panjang ini atau harus tersandung dan terhenti ditengah jalan, syukur dapat diraih dengan gemilang tercatat sebagai pemimpin yang Khusnul Khatimah. Yang berarti bangsa Indonesia akan mencapai keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan yang sejati.

Daftar Pustaka

Abdul. Qohar, Mas'ud Khasan. tt. *Kamus Istilah Pengetahuan Populer*. CV Bintang Pelajar

- Departemen Agama, Balitbang. 1984. *Kepemimpinan Umat Islam*, Jakarta: Proyek Penelitian.
- Kara, Muslimin H. 2005. *Bank Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Koeswadji, Hermin H. 1994. *Korupsi di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kompas, 14 September 1997.
- Noeh, Munawar Fuad. 1997. *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*. Jakarta: Zihrul Hakim.
- Republika, 9 Juli 1997.
- Tangkilisan, Hessel N. 2003. *Kebijakan Publik Untuk Pemimpin Berwawasan Internasional*. Yogyakarta: Balairung & C.
- Tempo Edisi 31 Januari - 6 Februari 2005
- UU Anti KKN No. 28 Th. 1999, *Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.
- Wirosarjono, Sucipto. 1996 *Dialog dengan Kekuasaan*. Bandung: Mizan.
- Zainuddin, Muhadi. 2002. *Studi Kepemimpinan Islam*. Yogyakarta: Al Muhsin Press.